

Analisis Perolehan Suara dalam Pemilu 2014: OLIGARKI POLITIK DIBALIK KETERPILIHAN CALEG PEREMPUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya pada 9 Mei 2014, pukul 23.20 WIB, mengumumkan dan menetapkan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2014. Ada beberapa hal penting dari pengumuman KPU tersebut, yaitu: (1) Jumlah suara sah adalah 124.972.491 suara, atau dapat dikatakan partisipasi pemilih mencapai 75.11%; (2) Sebesar 24.89% pemilih tidak menggunakan hak pilihnya; (3) Ada 10 partai politik berhasil meraih suara nasional diatas 3,5% (*parliamentary treshold*) untuk kursi DPR RI, partai politik yang tidak lolos PT adalah PBB dan PKPI; (4) PDI Perjuangan meraih suara terbanyak yaitu 23.681.471 (18.95%), disusul berturut-turut adalah Golkar (14.75%), Gerindra (11.81%), Demokrat (10.19%), PKB (9.04%), PAN (7.57%), PKS (6.79%), Nasdem (6.72%), PPP (6.63%), dan Hanura (5.26%).

Catatan lain dari proses penyelenggaraan pemilu 2014 adalah laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan jajaran penyelenggara pemilu. Sebagai informasi, DKPP telah memecat 17 anggota PPK dan KPU kabupaten/kota, serta ada beberapa yang sedang proses di kepolisian. Hal ini tentu menjadi peringatan bagi KPU RI untuk meningkatkan kapabilitas dan integritas jajarannya di berbagai tingkatan hingga tempat pemungutan suara (TPS), khususnya menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden dua bulan ke depan.

Berkaitan dengan hasil pemilu, Puskapol FISIP UI melakukan pengumpulan data dan analisis tentang perolehan suara dalam Pemilu 2014. Dibandingkan analisis hasil perolehan suara dalam Pemilu 2009, ada temuan penting yang berubah dan layak dicermati. Analisis perolehan suara pada Pemilu 2009 menunjukkan beberapa fenomena: (1) Sebagian besar pemilih memberikan suara di surat suara kepada caleg, bukan partai politik, yaitu 69% pemilih mencontreng nama caleg dan 31% mencontreng nama partai politik; (2) Dari total suara yang diberikan pada caleg, rata-rata perolehan suara caleg perempuan sebesar 22.45% dan rata-rata perolehan suara caleg laki-laki adalah 77.54%; (3) persentase keterpilihan perempuan di DPR pada Pemilu 2009 meningkat dibanding hasil Pemilu 2004, yaitu 103 caleg perempuan terpilih atau 18% dari total kursi DPR. Lalu bagaimana dengan hasil perolehan suara pada Pemilu 2014? Apa saja yang berubah? Bagaimana perolehan suara dan perkiraan keterpilihan caleg perempuan pada Pemilu 2014 ini? Berikut ini adalah temuan dan analisis terkait hasil perolehan suara dalam Pemilu 2014.

A. Analisis Perolehan Suara dalam Pemilu 2014

Analisis perolehan suara ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data rekapitulasi suara caleg DPR RI yang meliputi: 77 daerah pemilihan dari 33 provinsi. Berikut poin-poin temuan perolehan suara dalam Pemilu 2014:

- 1. Kekuatan partai politik di daerah pemilihan terpusat pada persaingan antara PDIP dan Golkar.** PDIP sebagai pemenang pemilu, unggul dalam perolehan suara di 36 dapil, disusul Golkar yang unggul di 25 dapil. Berturut-turut partai lainnya: PKB unggul di 6 dapil, Gerindra dan Demokrat masing-masing unggul di 4 dapil, kemudian PAN dan Nasdem masing-masing hanya unggul di satu dapil. Sementara PKS, PPP, dan Hanura tidak unggul di seluruh dapil.
- 2. Mayoritas coblos nama caleg.** Data menunjukkan lebih dari separo pemilih memberikan suara dengan mencoblos nama caleg (70%), sedangkan yang mencoblos partai politik adalah 30%. Kondisi tersebut hampir sama dengan hasil Pemilu 2009, yaitu 69.03% untuk caleg dan 30.96% untuk partai. Ada kecenderungan semakin meningkat pemilih yang memberikan suara untuk nama caleg pada surat suara.
- 3. Mayoritas pilih caleg laki-laki.** Dari pemilih yang memberikan suara untuk caleg, sebagian besar memilih caleg laki-laki yaitu 76.69%. Sedangkan yang memberikan suara untuk caleg perempuan adalah **23.31%**. Persentase perolehan suara caleg perempuan tersebut masih jauh dari pencalonan perempuan yang mencapai 37% pada Pemilu 2014 ini. Di sisi lain, sekalipun masih jauh lebih rendah dari suara yang diberikan untuk caleg laki-laki, jika dibandingkan data Pemilu 2009 maka ada peningkatan sedikit perolehan suara caleg perempuan (dari 22.45% menjadi 23.31%).
- 4. Perolehan suara caleg perempuan tiap partai: PPP tertinggi, PKS terendah.** Menarik untuk melihat lebih jauh persentase perolehan suara perempuan dibandingkan dengan total perolehan suara partai politik. Berikut data dari 10 partai politik yang lolos PT:

Tabel 1.
Persentase Perolehan Suara Caleg Perempuan Hasil Pemilu 2014

Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang Lolos PT	% perolehan suara caleg perempuan tiap partai politik
PPP	22.33
NASDEM	19.74
DEMOKRAT	18.56
PAN	17.60
GOLKAR	16.22
PDIP	15.89
GERINDRA	15.50
HANURA	13.57
PKB	13.23
PKS	13.20

Data tabel tersebut menunjukkan persentase perolehan suara caleg perempuan PPP cukup signifikan menyumbang perolehan suara partai politiknya yaitu 22.33%, dan tertinggi di antara 10 partai. Sementara PDIP yang merupakan partai peraih suara terbanyak, persentase perolehan suara caleg perempuannya adalah 15.89%.

5. **Ada 20 Daerah Pemilihan dengan Suara Caleg Perempuan >30%.** Dari data suara yang telah diolah, terdapat 20 dapil (26%) yang persentase perolehan suara caleg perempuan mencapai diatas 30%. Dapil Jawa Barat IV (meliputi kabupaten Sukabumi dan kota Sukabumi) merupakan dapil yang tertinggi perolehan suara caleg perempuan, mencapai 51.14%. Di Jabar IV ini bersaing para caleg perempuan yang populer seperti Desy Ratnasari (PAN), Rosmailis Idris (PAN), Ribka Tjiptaning (PDIP), Dewi Asmara (Golkar), Ingrid Kansil (Demokrat), dan Reni Marlinawati (PPP).

Tertinggi berikutnya adalah Jawa Tengah V (meliputi Kab Boyolali, Kab Klaten, Kab Sukoharjo, Kota Surakarta), dimana perolehan suara caleg perempuan mencapai 44.23%. Nama-nama populer bersaing di Jateng V seperti Puan Maharani (PDIP), Koes Moertiyah (Demokrat), dan Angel Lelga (PPP).

Tabel 2.
Daerah Pemilihan dengan Perolehan Suara Caleg Perempuan Diatas 30%

No	Dapil	%Suara Caleg Perempuan Pemilu 2014	%Suara Caleg Perempuan Pemilu 2009	Keterangan
1	Jambi	34.91	37.99	Turun
2	Kalimantan Timur	30.88	28.40	Naik
3	Jawa Tengah V	44.23	38.30	Naik
4	DKI Jakarta II	34.43	41.42	Turun
5	Kalimantan Barat	30.06	25.94	Naik
6	Sulawesi Utara	30.04	27.45	Naik
7	Sulawesi Selatan 1	33.46	24.03	Naik
8	Sulawesi Selatan III	32.84	21.31	Naik
9	Jawa Barat IV	51.14	29.31	Naik
10	Jawa Barat VII	35.79	29.92	Naik
11	Jawa Barat IX	30.55	19.08	Naik
12	Jabar X	31.02	20.97	Naik
13	Jabar XI	31.98	16.27	Naik
14	Banten 1	35.31	46.80	Turun
15	Kepulauan Riau	35.81	35.86	Sama
16	Maluku	35.84	23.10	Naik
17	Bengkulu	34.66	33.82	Naik
18	Lampung 2	31.16	26.61	Naik
19	Sulawesi Tenggara	32.82	21.77	Naik
20	Sulawesi Barat	40.24	18.04	Naik

Sementara itu masih ada beberapa dapil yang perolehan suara caleg perempuan lebih rendah dari 10%. Seperti Jateng II (9.15%), Bali (8.9%), dan Jatim XI (9.81%).

B. Profil Caleg Perempuan Terpilih DPR-RI pada Pemilu 2014

1. **Caleg perempuan DPR yang terpilih adalah 17.3%.** Jumlah caleg perempuan DPR RI yang terpilih pada Pemilu 2014 adalah 97 orang (atau 17.3% dari 560 kursi). Jumlah tersebut **mengalami penurunan** dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009 (103 orang/18%). Penurunan ini layak dikritisi karena berbanding terbalik dengan tingkat pencalonan perempuan di DPR RI, yakni 33.6% pada pemilu 2009, yang naik mencapai 37% pada pemilu 2014 sejalan adanya Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur minimum 30% pencalonan perempuan dalam Daftar Calon Tetap di setiap dapil DPR/DPRD. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan bagi keterpilihan perempuan dalam parlemen tidak secara otomatis teratasi dengan dikeluarkannya peraturan teknis yang secara formal ditujukan untuk mengawal proses pencalonan perempuan.
2. **Calon anggota perempuan DPD yang terpilih adalah 26.51%.** Jumlah calon anggota perempuan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) yang terpilih pada Pemilu 2014 adalah 35 orang (atau 26.51% dari total 132 orang). Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009 yaitu 38 orang (28.78%).
3. **Caleg perempuan yang terpilih pada pemilu 2014 didominasi oleh “wajah-wajah baru” di parlemen nasional.** Dari 103 anggota perempuan di DPR RI periode 2009–2014, hanya ada 38 orang yang terpilih kembali. Dengan kata lain, hanya sebagian kecil (6.78% dari total 560 kursi) caleg perempuan petahana lolos kembali menjabat di DPR RI sementara sebagian besar terpental keluar. Jika dibandingkan dengan jumlah caleg perempuan terpilih pada pemilu 2014 (n=97), maka persentase caleg perempuan petahana adalah 39.17%.
4. **Kesenjangan antara perolehan suara perempuan dengan perolehan kursi perempuan semakin tajam.** Pada pemilu 2009 tercatat 22.45% rata-rata perolehan suara perempuan untuk DPR RI dengan 18% hasil perolehan kursi perempuan. Pada pemilu 2014 tercatat perkiraan 23.31% perolehan suara perempuan untuk DPR RI namun hasil perolehan kursi sekitar 17%. Kebijakan internal partai dalam penentuan kursi menjadi aspek penting yang perlu didiskusikan kembali, bahkan layak diperiksa apakah peningkatan keterpilihan perempuan telah benar-benar menjadi bagian dari komitmen internal partai atau sekedar pemenuhan syarat administratif dalam tahap pencalonan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan/UU.
5. **Tiga partai dengan perkiraan persentase terbesar perolehan kursi perempuan adalah PPP (26%), diikuti Demokrat (21%), dan PKB (21%).** Partai dengan persentase terkecil perolehan kursi perempuan adalah PKS (3%). Untuk selengkapnya, berikut adalah perkiraan jumlah caleg perempuan terpilih pada Pemilu 2014 berdasarkan partai politik dan persentase yang diperoleh dari perbandingan dengan perkiraan perolehan kursi partai

Tabel 3.
Jumlah Kursi Perempuan DPR RI Hasil Pemilu 2014
Berdasarkan Asal Partai Politik

No	Partai Politik	Perolehan Kursi Perempuan	Perolehan kursi partai	Persen kursi perempuan per partai
1	PDI Perjuangan	21	109	19%
2	Golkar	16	91	17%
3	Gerindra	11	73	15%
4	Demokrat	13	61	21%
5	PKB	10	47	21%
6	PAN	9	49	18%
7	PKS	1	40	3%
8	Nasdem	4	35	11%
9	PPP	10	39	26%
10	Hanura	2	16	12%
	Jumlah	(97 dari N= 560)	560	17%

6. **Fluktuasi perolehan kursi perempuan di antara partai politik peserta Pemilu 2009 dan 2014 menunjukkan keberagaman.** Demokrat adalah partai yang mengalami penurunan paling signifikan untuk perkiraan jumlah perolehan kursi perempuan pada pemilu 2014 dibandingkan 2009 (dari 36 menjadi 13 kursi perempuan). Meskipun total perolehan kursi partai Demokrat turun, namun secara agregat persentase kursi perempuan partai Demokrat relatif stabil (24% menjadi 21%). Simak tabel berikut:

Tabel 4.
Perbandingan Jumlah Kursi Perempuan DPR RI
Hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2014

No	Partai Politik	Perolehan Kursi Perempuan		Catatan Perubahan
		2009	Perolehan 2014	
1	PDI Perjuangan	18	21	Naik
2	Golkar	19	16	Turun
3	Gerindra	5	11	Naik
4	Demokrat	36	13	Turun
5	PKB	7	10	Naik
6	PAN	7	9	Naik
7	PKS	3	1	Turun
8	Nasdem	--	4	--
9	PPP	5	10	Naik
10	Hanura	4	2	Turun

Tabel 5.
Perbandingan Persentase Kursi Perempuan per Partai di DPR RI
Hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2014

No	Partai Politik	Persentase kursi perempuan per partai		Catatan Perubahan
		2009	Perolehan 2014	
1	PDI Perjuangan	18%	19%	Naik 1%
2	Golkar	18%	17%	Turun 1%
3	Gerindra	19%	15%	Turun 4%
4	Demokrat	24%	21%	Turun 3%
5	PKB	25%	21%	Turun 4%
6	PAN	15%	18%	Naik 3%
7	PKS	5%	3%	Turun 2%
8	Nasdem	-	11%	-
9	PPP	13%	26%	Naik 13%
10	Hanura	22%	12%	Turun 10%

Dari sembilan partai yang dapat dibandingkan, hanya ada tiga partai yang persentase perkiraan perolehan kursi perempuannya naik, yaitu: PPP (13%), PAN (3%), dan PDIP (1%). Sebagian besar lainnya, enam partai menunjukkan penurunan persentase perolehan kursi perempuan, dengan kisaran penurunan antara 2% (PKS) hingga 10% (Hanura). Temuan ini **mengindikasikan kenaikan perolehan kursi partai tidak selalu diikuti oleh kenaikan persentase kursi perempuan**. Adapun peningkatan kursi perempuan di DPR RI paling tajam mencapai 13% berasal dari PPP. Penurunan paling drastis mencapai 10% yakni pada Partai Hanura.

- Jaringan kekerabatan dengan elit politik mendominasi basis keterpilihan caleg perempuan.** Basis rekrutmen caleg perempuan yang juga menjadi indikasi basis keterpilihan caleg perempuan dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

Tabel 6.
Basis Keterpilihan Caleg Perempuan Terpilih pada Pemilu 2014

No	Kategori Profil	Jumlah	Persen
1	Jaringan kekerabatan dengan elit politik	35	36%
2	Kader partai	21	22%
3	Elit ekonomi	18	19%
4	Aktivis ormas/LSM	8	8%
5	Anggota DPD/DPRD	9	9%
6	Selebriti/figur populer	6	6%
	Jumlah	97	100%

Jaringan kekerabatan dengan elit politik mencakup hubungan kekeluargaan melalui pernikahan (isteri pejabat politik ataupun petinggi partai politik) serta anak-anak dan saudara. **Kader partai** dikenali melalui intensitas keterlibatan caleg secara aktif dalam partai termasuk juga lamanya menjadi anggota partai. **Elit ekonomi** dirujuk berdasarkan kekuatan finansial yang dimiliki oleh caleg, misalnya sebagai tokoh dunia

usaha. **Aktivis ormas/LSM** adalah caleg yang latar belakang keterpilihannya didasari terutama oleh aktivitas dan kiprahnya di ormas/LSM yang dikenal secara luas.

8. Data keterpilihan caleg perempuan di DPR RI menunjukkan **dominasi jaringan kekerabatan dengan elit politik sebagai basis rekrutmen caleg hingga mencapai 36%**. Persentase ini diperoleh melalui penelusuran latar belakang masing-masing perempuan terpilih dan didapati sebagian besar dari mereka adalah adik, kakak, ataupun istri dari penguasa/pejabat politik serta petinggi partai politik yang mencalonkan mereka. Penting untuk dicatat bahwa situasi ini sebenarnya telah ditemukan juga pada hasil pemilu 2009 dimana sekitar 42% perempuan terpilih sebagai anggota DPR RI merupakan bagian dari perpanjangan tangan penguasa/pejabat politik serta petinggi partai. Penurunan signifikan tercatat pada basis keterpilihan sebagai selebriti/figur populer, yakni dari 25% di tahun 2009 menjadi 6% di tahun 2014.
9. Dominasi basis keterpilihan caleg perempuan yang berlandaskan hubungan kekerabatan dengan politik sejak pemilu 2009 hingga pemilu 2014 mengindikasikan **stagnasi sempitnya landasan rekrutmen caleg perempuan oleh partai**. Situasi ini secara khusus berdampak pada perempuan karena basis keterpilihan caleg perempuan berlandaskan kekerabatan menegaskan ketergantungan perempuan pada basis kekuasaan laki-laki, kekuatan kekayaan materil, dan pelestarian relasi kuasa yang senjang secara politik maupun sosial antara perempuan dan laki-laki, serta antara yang miskin dan yang kaya (sekalipun sesama perempuan). Lebih lanjut, situasi ini bermuara pada terkonsentrasinya kekuasaan elit politik dan elit ekonomi di tangan segelintir orang dalam parlemen atau praktek politik oligarki.
10. **Rentannya posisi politik caleg perempuan yang hanya dapat diidentifikasi melalui telaah kritis terhadap basis rekrutmennya sebagai caleg mengarah pada semakin lemahnya peluang caleg perempuan untuk bersuara kritis dan menghasilkan kebijakan-kebijakan politik yang berbeda**. Di satu sisi, advokasi untuk peningkatan perempuan sebagai anggota parlemen masih relevan diperjuangkan namun di sisi lain basis rekrutmen caleg perempuan masih didominasi oleh ikatan kekerabatan yang justru melanggengkan kesenjangan kuasa politik dan ekonomi serta resistensi terhadap kesetaraan peluang partisipasi politik. Kondisi inilah yang kami sebut sebagai **politik gender oligarki** dalam DPR RI. Kehadiran caleg perempuan hasil pemilu 2014 masih didominasi oleh hasil dari adopsi kebijakan afirmatif yang ditundukkan di bawah kuasa politik dan ekonomi para pejabat/penguasa politik maupun elit ekonomi. Implementasi kebijakan afirmatif masih sangat terbatas pada pemenuhan syarat administratif sejauh partai dapat meloloskan diri untuk ikut dalam pemilu.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Data hasil perolehan suara dalam Pemilu 2014 menunjukkan adanya kesenjangan antara rata-rata perolehan suara caleg perempuan dengan persentase keterpilihan caleg perempuan, yaitu 23.31% berbanding 17%. Ada beberapa hal yang diduga menyebabkan kesenjangan tersebut. Pertama adalah ketatnya persaingan internal caleg satu partai di satu dapil dalam mengejar perolehan suara. Ketatnya persaingan tersebut membuat para caleg berkonsentrasi untuk kemenangan diri sendiri, dan tidak memprioritaskan perolehan suara partai. Di sisi lain, partai politik pun tidak mampu mengonsolidasikan para calegnya sehingga ada fenomena caleg satu partai di satu dapil saling menjegal satu sama lain.

Kesenjangan juga disebabkan tingkat persaingan partai politik di setiap dapil yang semakin ketat. Rata-rata partai politik mendapat satu kursi di setiap dapil, dengan dominasi caleg laki-laki yang memperoleh suara terbanyak. Sedangkan caleg perempuan yang menang umumnya adalah figur yang memiliki jaringan kekerabatan dengan elit politik dan ekonomi. Dengan gambaran ini maka wajah parlemen didominasi oleh figur-figur dengan kekuatan modal dan jaringan kekerabatan politik sesuai dengan basis rekrutmen dan basis keterpilihan mereka.

Hasil pemilu 2014 kembali menegaskan bahwa kebijakan afirmatif sebatas diadopsi oleh partai politik yang didorong oleh UU/peraturan. Partai politik belum mengimplementasikan afirmatif di internalnya dengan tujuan meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Pembaruan internal partai sudah sangat mendesak, khususnya dalam kaderisasi dan rekrutmen caleg. Partai harus memberikan perhatian khusus pada penguatan perempuan di partai politik, bukan sekedar mencalonkan perempuan secara instan untuk memenuhi kuota pencalonan.

Maka Puskapol FISIP UI merekomendasikan agar segera dilakukan:

1. Reformasi internal partai, terutama kaderisasi dan rekrutmen caleg.
2. Implementasi kebijakan afirmatif untuk perempuan oleh partai politik harus tunduk pada prinsip untuk memperkuat dan memperluas basis rekrutmen perempuan.
3. Basis keterpilihan caleg harus dikembalikan pada prinsip representasi politik, yakni sebagai upaya menghadirkan kembali kepentingan rakyat seluas-luasnya di parlemen, dan bukan sebagai perpanjangan tangan elit ekonomi, pejabat politik maupun petinggi partai politik.
